

# Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

YOSERIZAL & WAHYU EKO YUDIATMAJA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas,  
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, 25163. Telp/fax. (0751) 71266

**Abstract:** The development of information and communication technology is faster to give some eastness for human life. Because of the advanced of information technology, government can develop public service in information technology. This technology is called by e-Government. In regional contexts, by spirit of regional autonomy wich give democratized and autonomy to region, the Government of West Sumatera Province also try to develop e-Government as one of the effort to improving public service quality. Approachment or metode used is qualitative with descriptive type. The process of submitting data done by using interview and documentation done in some instantiation in environment of the Government of West Sumatera Province. The technic of informan choosing used is purposive sampling. Data is analyzed by using etic and emic analyze. The research result show that the strategy of Government of West Sumatera Province in developing e-Government as one of effort of improving public service quality by earlier analyzing the environment of organization strategic. The strategy is: 1) Comparative Advantage Strategy; (a) Releasing product of regional law as law background of e-Government development, (b) Pointing Public Relationship Bureau as work unit manufacturer of e-Government development, 2) Investment/ Divestment Strategy; (a) Adding a number of employee program and giving guidance and training to improve employee quality, (b) Pointing some employees to manufacture e-Government on each SKPD, (c) Selecting unurgent programs and plan optimalized, 3) Mobilization Strategy; (a) Building strong system, and 4) Damage Control Strategy; (a) Cooperating with involved institution in central.

**Keywords:** *Strategy, e-Government, regional autonomy public service.*

Pada dasawarsa 1990an berkat kecanggihan teknologi informasi, dengan bantuan internet pemerintah dapat memberikan pelayanan publik secara *on-line*. Teknologi ini disebut dengan *electronic government (e-Government)*. Di Indonesia *e-Government* berkembang secara alami sejak sebelum tahun 2003. Pemerintah mulai menyadari perlunya pengembangan *e-Government* di seluruh jajaran pemerintahan, maka pada tahun 2003 dikeluarkanlah Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan *e-Government* di Indonesia (Susartono, 2006: 2). Dengan keluarnya inpres tersebut maka secara yuridis-formal *e-Government* memiliki landasan yang kuat untuk diimplementasikan pada setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Paralel dengan itu, melalui otonomi daerah yang telah berjalan pasca tumbanganya Orde Baru, penerapan *e-Government* semakin menemukan momentumnya. Gerakan reformasi 1998 telah membawa berbagai perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang monolitik-sentralistik memberikan harapan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan berkeadilan. Belajar dari berbagai kelemahan dari pemerintahan terpusat (*centered government*), maka tidak ada jalan lain kecuali memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri, dalam bentuk otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka pada masa pemerintahan transisi (Habibie) dikeluarkanlah Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian pada pemerintahan Megawati direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budayanya. Dengan diberikannya kewenangan yang sangat besar kepada daerah, daerah memiliki legitimasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*), sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan prakarsa, inisiatif dan potensi yang dimilikinya dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, responsif, akuntabel dan nonpartisan. Setiap daerah diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pelayanan publik di daerahnya. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau jaringan yang berbasis teknologi internet yang digunakan pemerintah yang lebih populer dengan sebutan *e-Government* (Ely Sufianti, 2007 : 356).

Aplikasi *e-Government* di semua lapisan pemerintahan pada hakikatnya adalah salah satu sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kehadiran *e-Government* dalam sistem tata pemerintahan dalam berbagai tingkat pada dasarnya adalah solusi bagi masalah-masalah pemerintahan seperti adanya kelambanan dalam pelayanan publik, kualitas kebijakan yang buruk, manajemen informasi yang hanya bersifat vertikal, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tinggi akibat lemahnya pengawasan, dan rendahnya investasi dari luar karena tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi daerah (Junaidi, 2005: 59-60).

Di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerapan *e-Government* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi yang diusung oleh Gamawan Fauzi-Marlis Rahman ketika berkampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005. Misi yang

diusung pada saat itu adalah tujuh agenda pembangunan Sumatera Barat. Untuk mengakomodir tujuh agenda pembangunan tersebut, maka setelah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, pada tahun 2005 Gamawan Fauzi langsung mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 2006-2010. Pada tahun 2007, peraturan gubernur tersebut direvisi menjadi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 2006-2010.

Berkaitan dengan itu, penerapan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2006-2010. Senada dengan pendapat tersebut, Yulfian (2007: 4) mengungkapkan bahwa, dalam RPJM tersebut pada agenda ketiga, dinyatakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, diwujudkan dengan arah kebijakan meningkatkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam agenda membangun pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Untuk mencapai agenda tersebut, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2007 direncanakan tujuh kegiatan pokok. Salah satu diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Dalam rangka pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ada strategi tertentu yang harus diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Strategi dalam pandangan Tangkilisan (2006: 252) merupakan terminologi yang digunakan secara luas oleh organisasi laba (*profit oriented*), yang kemudian dalam perkembangannya, digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik (*nonprofit oriented*), baik di sektor pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi *volunter* (NGO), karena NGO dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat

(Hasmiati, 2008 :837). Oleh karena itu strategi dapat menentukan tujuan jangka panjang dan program aksi yang akan dicapai dengan memperhitungkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pengaruh lingkungan eksternal organisasi (Hadi Sutrisno, 2008 : 25-26). Jadi faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi strategi organisasi dalam pengembangan e-Government. Dari uraian diatas maka permasalahan penelitian adalah bagaimana strategi Pemerintah Sumatera Barat dalam pengembangan E-Government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan itu maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam pengembangan E-Government dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan publik.

Analisis lingkungan strategis (*strategic environment analysis*) disebut juga dengan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) (Rangkuti, 2008: 18-19). Tujuan analisis lingkungan strategis ini, menurut Tangkilisan (2006: 258) adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi apa yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

Menurut Gaspersz (2004: 20-22) kerangka kerja analisis lingkungan strategis terdiri dari penilaian internal dan eksternal bahkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal satu sama lain saling terkait (Ahmad Ramzy, 2006 : 388). Penilaian internal disebut juga sebagai *situation inventory*. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, mengevaluasi kapasitas atau kemampuan untuk menghadapi isu-isu, masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*). Setelah melakukan analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Penilaian eksternal atau disebut juga dengan *environmental scan*, digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang sekarang dan antisipasi perubahan-perubahan lingkungan di masa mendatang.

Salah satu model analisis SWOT yang banyak digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh Kearns (lihat tabel 1). Model Kearns berbentuk diagram yang menampilkan matriks enam kotak, dua yang paling atas adalah kotak faktor eksternal yang terdiri dari *opportunities* dan *threats*. Sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor internal yang terdiri dari *strenghts* dan *weaknesses*. Empat kotak yang lainnya merupakan isu-isu strategik yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Keempat isu strategik itu adalah *comparative advantage, mobilization, investment/divesment* dan *damage control* (Salusu, 2005: 356).

Tabel 1. Model Analisis SWOT Versi Kearns

		Faktor Eksternal	
		<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
Faktor Internal	<i>Strenghts</i>	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
	<i>Weaknesses</i>	<i>Investment/Divestment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Salusu (2005: 357)

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2008 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipakai adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipakai karena orang yang diambil sebagai informan adalah orang yang lebih mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Artinya, orang-orang yang dipilih sebagai informan dalam

penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui strategi pengembangan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan penelitian ini, informan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama
1	Gubernur Sumatera Barat	H. Gamawan Fauzi, S.H, M.M
2	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Yulitar, S.H.
3	Kepala Bagian Telematika Elektronik Provinsi Sumatera Barat	Hendi Yulian, S.H, M.Si.
4	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ir. Yulfa Nasrida
5	Kepala Sub Bidang Anggaran Kesejahteraan Sosial Budaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Suhendri, S.Kom, M.Sc.
6	Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat	H. Rasmi Soeki
7	Anggota Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat	Drs. Marhaedi Efendi, M.Si.
8	Kepala Sub Bagian Piranti Keras Bagian Telematika Elektronik Provinsi Sumatera Barat	Indra Sukma, S.Kom
9	Kepala Sub Bagian Jaringan Informasi Bagian Telematika Elektronik Provinsi Sumatera Barat	Destra Triarman, S.Kom

Dalam proses penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data

dengan jalan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semiterstruktur (*indept interview*). Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Data yang telah didapatkan dari informan akan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan analisis emik. Analisis etik adalah menginterpretasikan data berdasarkan pemahaman dan pengetahuan teoritis yang dimiliki oleh peneliti. Sedangkan analisis emik adalah interpretasi data berdasarkan pendapat yang diberikan oleh informan penelitian. Kedua analisis tersebut tidak hanya dapat ditafsirkan menurut metode, teknik dan pandangan peneliti sendiri, tetapi juga disertai dengan literatur yang ada. Selanjutnya, dari analisis etik dan emik ini diakhiri dengan membuat suatu penjelasan tentang permasalahan penelitian.

**HASIL**

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. **Portal <http://www.sumbarprov.go.id>, dikelola oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat.**



Gambar 1. Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Sumber: PT Telkom Sumatera Barat (2008)



## 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LPSE PROVINSI SUMATERA BARAT  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Home Tentang Kami Tanya Jawab Regulas Site Map Kontak Kami

LPSE merupakan situs e-pengadaan yang melakukan lelang secara online. Perusahaan Anda dapat mengikuti lelang di LPSE dengan terlebih dahulu MENDAFATAR SEBAGAI PENYEDIA BARANG/JASA. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi kami.  
Penting: Semua pengguna sistem LPSE ini berikat dengan Pakta Integritas.

**e-Procurement**  
LELANG SECARA ELEKTRONIK

Nama Paket	Institusi	Paçu	Download Dokumen
Fengadaan Sistem LAN Bappeda Sumatera Barat	LPSE Prov. Sumbar	Rp 750,0 jt	11 Dec - 12 Dec 2008
Fengadaan Mobiluler Sekolah	LPSE Prov. Sumbar	Rp 600,0 jt	11 Dec - 12 Dec 2008

Total Pengunjung 14

LOGIN KE LPSE  
TAPILAHKAN USER ID DAN PASSWORD ANDA!

User ID :

Password

**LOGIN**

[Lupa Password]

[Petunjuk untuk penyedia barang/jasa](#)  
[Pendaftaran penyedia barang/jasa](#)

**CARI LELANG**

Nama lelang

Kategori

**Pengumuman**  
PENGADAAN

**Berita**  
TENTANG PENGADAAN

**Cirgahayu Kemerdekaan RI yang Ke-63**  
 Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju

Gambar 2. LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2008)

### 3. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-Government.

#### a. Mengeluarkan beberapa produk hukum daerah sebagai landasan hukum pengembangan e-Government

Kebijakan pengembangan e-Government di Indonesia saat ini masih mengacu pada Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Secara tegas, presiden menginstruksikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mengembangkan e-Government sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Mengacu kepada instruksi presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang RPJM Provinsi Sumatera

Barat 2006-2010. Di dalam RPJM tersebut, pada agenda ketiga dinyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih salah satu program yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Secara khusus memang belum ada produk hukum daerah berupa perda yang secara khusus mengatur pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai langkah antisipasi terhadap belum dirumuskannya perda yang mengatur tentang pengembangan *e-Government*, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan masalah ini. Kebijakan tersebut adalah (Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, 2007a: v):

- a) Keputusan Gubernur No. 160 Tahun 2007 tentang Penetapan Kepemilikan Domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Keputusan Gubernur No. 59 Tahun 2008 tentang Tim Pelaksana Teknis Implementasi SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Sumatera Barat.
- c) Instruksi Gubernur No. 4 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan dan Perluasan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Mendukung Program Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d) Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2007 tentang Penamaan Situs Web SKPD Menggunakan Sub Domain di Depan Nama Domain Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e) Surat Gubernur No. 2289 Tahun 2006 tentang Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja pengelola program pengembangan *e-Government***

Untuk menyelenggarakan pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk sebuah unit organisasi yang bertugas mengelola itu. Secara khusus, memang belum ada sebuah unit kerja yang otonom yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengembangkan

*e-Government* di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Instruksi Gubernur No. 4 Tahun 2007 dan Surat Gubernur No. 2289 Tahun 2006 telah menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja pengelola program pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga setiap SKPD harus mengkoordinasikan pengembangan *e-Government* dengan Biro Humas selaku unit organisasi pengelola program pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya unit kerja yang bertugas mengelola *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun perencanaan strategis pengembangan *e-Government*.

**c. Menambah jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai**

Salah satu kelemahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government* adalah minimnya pegawai yang memiliki keahlian teknologi informasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, perlu diambil suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi yang diambil adalah dengan menambah jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas mereka.

Tabel 3. Rencana Peningkatan Pegawai dalam Bidang TIK di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Formasi CPNS Tahun 2008

No	Bidang	Spesialisasi	Strata	Jumlah	Penempatan
1	TIK	Ilmu Komputer	S <sub>1</sub>	1 orang	Masing-masing SKPD
2	TIK	Ilmu Komputer	S <sub>1</sub>	2 orang	Bagian Telematika
3	TIK	Manajemen Informatika	D <sub>3</sub>	3 orang	Bagian Telematika

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (2007)

Dari segi kuantitas (jumlah), jelas diperlukan penambahan jumlah personel agar kebutuhan pegawai terpenuhi. Secara bertahap setiap tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memprioritaskan sarjana yang memiliki basis keilmuan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

untuk diangkat dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk Formasi CPNS tahun 2008, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4 di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengangkat 1 orang Sarjana Ilmu Komputer yang akan ditempatkan pada masing-masing SKPD. Sementara itu, untuk Bagian Telematika akan direkrut 2 orang sarjana dengan spesialisasi ilmu komputer dan 3 orang ahli madya dalam bidang manajemen informatika. Kebijakan ini diambil agar setiap SKPD memiliki pegawai yang memiliki keahlian teknologi informasi.

Untuk perbaikan kualitas pegawai, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai yang ada untuk meningkatkan kecakapan mereka di bidang teknologi informasi. Bimbingan dan pelatihan diberikan atas kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

Tabel 4. Daftar Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan *Training for Trainer* dari Bappenas Pada Tahun 2008

No	Kelompok	Tempat dan Waktu Bimbingan		
		Tahap 1 (Januari-April)	Tahap 2 (Mei-Agustus)	Tahap 3 (September-Desember)
	Pengelola LPSE			
1	Help Desk	4 orang	5 orang	3 orang
2	Verifikator	4 orang	4 orang	3 orang
3	Admin	3 orang	3 orang	1 orang
4	Trainer	3 orang	3 orang	3 orang
	Jumlah	14 orang*	15 orang**	10 orang*
Total (Jumlah Tahap 1 + Tahap 2 + Tahap 3) = 39 orang				

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan Ir. Yulfia Nasrida (13 November 2008)

Keterangan:

\* = Pegawai Pergi Bimbingan ke Bappenas

\*\* = Bappenas datang ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk melatih

Selama tahun 2008 sudah banyak pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan LPSE dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Seperti yang terlihat pada tabel 5, pegawai Bappeda yang telah mendapatkan bimbingan dan pelatihan aplikasi LPSE secara keseluruhan berjumlah 39 orang. Pelatihan dilakukan dalam 3 tahap yang terdiri dari, tahap 1 terhitung dari bulan Januari sampai bulan April diikuti oleh 14 orang pegawai, tahap 2 dari

bulan Mei sampai Agustus diikuti oleh 15 orang, dan terakhir tahap 3 yang berlangsung pada bulan September hingga bulan Desember diikuti oleh 10 orang pegawai.

Selama kurun waktu 2007 dan 2008, Bagian Telematika Elektronik telah mengirim 6 orang pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi ke instansi terkait. Pada tahun 2007, 4 orang pegawai dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis di Departemen Dalam Negeri. Sedangkan sisanya 2 orang lagi, pada tahun 2008 dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis ke Inixindo Jakarta, sebuah konsultan swasta yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi (lihat tabel 6).

Tabel 5. Pegawai Bagian Telematika yang Mengikuti Bimbingan Teknis Selama Tahun 2007 dan 2008

No.	Nama Pegawai	Tempat dan Waktu Bimbingan	
		Depdagri/2007	Inixindo Jakarta/2008
1	Hendi Yulfian, S.H, M.Si.	v	-
2	Indra Sukma, S.Kom	v	-
3	Destra Triarman, S.Kom	v	v
4	Yusta Noverison, S.Kom	v	v

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan Destra Triarman S.Kom pada tanggal 13 November 2008

Keterangan:

v = Mengikuti bimbingan

- = Tidak mengikuti bimbingan

#### **d. Menunjuk beberapa orang pegawai untuk mengelola e-Government pada masing-masing SKPD**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menunjuk beberapa orang pegawai yang bertugas mengurus teknologi informasi (*e-Government*) di masing-masing SKPD, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum memiliki pegawai yang secara khusus menangani teknologi informasi di masing-masing SKPD. Artinya, secara khusus akan dibentuk suatu gugus tugas yang mengelola *e-Government*, minimal pegawai tersebut diangkat sebagai pejabat setingkat eselon IV.

Untuk merealisasikan rencana tersebut diperlukan revisi atas SOTK yang telah ada. SOTK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini yang mengacu pada Perda No. 2, 3 dan 4 Tahun 2008 tidak mengatur mengenai hal itu. Perubahan ini akan

dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

**e. Menyeleksi program-program yang belum mendesak dan optimalisasi anggaran**

Program pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana yang sangat besar. Di Biro Humas saja diperlukan dana sebesar Rp40.050.000 (*empat puluh juta lima puluh ribu rupiah*) untuk semua sub kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan *e-Government* (tabel 6). Dana yang sebesar itu hanya untuk Biro Humas, selaku unit kerja yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program pengembangan *e-Government*. Sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas.

Untuk mengatasi minimnya dana yang tersedia dalam program pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menyeleksi program-program pemerintah daerah yang belum mendesak dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

**f. Membangun sistem yang kuat**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan berbagai fasilitas dalam menunjang sistem yang tersedia untuk disempurnakan dan diperkuat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengikuti *trend* positif dalam membangun sistem tersebut. Sistem yang kuat dibutuhkan untuk melindungi program dan *data base* dari serangan para *hickers* yang akan membobol setiap bagian atau sub sistem *e-Government*.

**g. Berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat**

Dalam rangka pengembangan *e-Government*, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat. Pemerintah daerah akan membangun sistem informasi layanan publik berbasis teknologi informasi untuk menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Koordinasi dengan pemerintah pusat adalah strategi yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi

Tabel 6. Anggaran yang Dibutuhkan oleh Biro Humas untuk Program Pengembangan *e-Government* Tahun 2008

URAIAN	JUMLAH SATUAN		HARGA SATUAN		JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>40,050,000</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>					<b>26,350,000</b>
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai					26,350,000
Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan					20,500,000
- Biaya Pelatihan Manajerial Tek. Informasi	1	org	4,500,000	4,500,000	
- Biaya Pelatihan Teknis dan Non Teknis Penguasaan Teknologi Informasi	4	org	4,000,000	16,000,000	
Belanja Bimbingan Teknis/Non Teknis					5,850,000
- Gol IV	1	OP	1,250,000	1,250,000	
- Gol III	4	OP	1,150,000	4,600,000	
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					<b>13,700,000</b>
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>13,700,000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					13,700,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : Pelatihan Manajerial Pengelolaan Sistem Informasi					
- Gol IV ( 1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	450,000	900,000	
- Tiket Pesawat Padang Jakarta	1	OT	1,920,000	1,920,000	
Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi					
- Gol III ( 4 org x 2 hr x 1 kl)	8		400,000	3,200,000	
- Tiket Pesawat Padang Jakarta	4		1,920,000	7,680,000	
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG = Rp40,050,000</b>					

Sumber: Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat (2007b)



Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis (*SWOT analysis*) digunakan untuk menilai (*assesment*) lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*. Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang didapatkan di lapangan, baik data hasil wawancara maupun data dokumentasi. Tujuan dari analisis lingkungan strategis ini adalah untuk menemukan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*.

Analisis lingkungan strategis, digunakan juga oleh Yudiatmaja (2007: 36-40) dan Yulfian (2007: 12-14) dalam menganalisis strategi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Yudiatmaja lebih melihat Sumatera Barat secara makro, termasuk Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, sedangkan Yulfian lebih memfokuskan pada strategi Bagian Telematika Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*.

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal (*internal environment analysis*) terdiri dari kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*. Berdasarkan temuan data di lapangan, diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah; (1) Dukungan yang besar dari gubernur dan pimpinan SKPD, (2) Tersedianya portal <http://www.sumbarprov.go.id>, dan (3) Kerjasama yang dilakukan dengan PT Telkom. Sedangkan kelemahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah; (1) Secara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi, (2) Belum ada unit

kerja tersendiri yang otonom untuk mengelola *e-Government*, (3) Minimnya anggaran untuk program pengembangan *e-Government*, dan (4) Belum semua SKPD terhubung dengan jaringan intranet Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### b. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam analisis lingkungan eksternal akan dilihat bagaimana peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*. Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan karena lingkungan luar sangat berpengaruh terhadap organisasi. Dari temuan data di lapangan, peluang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government* adalah; (1) Otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri, (2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, dan (3) Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang menjadi ancaman dalam pengembangan *e-Government* oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu program dan *data base* dapat dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (*hicker*).

Tabel 7. Ringkasan Analisis Lingkungan Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan *e-Government*

Analisis Lingkungan Internal	Analisis Lingkungan Eksternal
<p><b>Kekuatan (<i>Strenghts</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan penuh dari gubernur dan pimpinan SKPD terhadap implementasi <i>e-Government</i></li> <li>Tersedianya portal <a href="http://www.sumbarprov.go.id">http://www.sumbarprov.go.id</a> sebagai media informasi publik</li> <li>Kerjasama yang dilakukan dengan PT Telkom</li> </ul> <p><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara kualitas dan kuantitas SDM belum mencukupi</li> <li>Belum ada unit kerja tersendiri yang otonom untuk mengelola <i>e-Government</i></li> <li>Minimnya anggaran yang tersedia dalam pengembangan <i>e-Government</i></li> <li>Belum semua SKPD terkoneksi dengan jaringan intranet Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>	<p><b>Peluang (<i>Opportunities</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan <i>e-Government</i></li> <li>Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat</li> <li>Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat</li> </ul> <p><b>Ancaman (<i>Threats</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem dan <i>data base</i> dapat dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (<i>hickers</i>)</li> </ul>

Sumber: Data diolah Desember 2008

## 2. Analisis SWOT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan *e-Government*

Setelah memetakan analisis lingkungan strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*,

Dari analisis SWOT tabel 8 terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, terdapat 4 jenis strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam *mengembangkan e-Government*. Strategi tersebut digunakan untuk menghadapi empat isu-isu strategik yang sedang dihadapi. Strategi itu adalah; (1) Strategi *comparative advantage*, (2) Strategi *investment/divestment*, (3) Strategi *mobilization*,

Tabel 8. Analisis SWOT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan *e-Government*

Faktor Eksternal	Peluang ( <i>Opportunities</i> ):	Ancaman ( <i>Threats</i> ):
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan <i>e-Government</i></li> <li>Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat</li> <li>Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem dan <i>data base</i> dapat dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab</li> </ul>
<b>Kekuatan (<i>Strenghts</i>):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan penuh dari gubernur dan pimpinan SKPD terhadap implementasi <i>e-Government</i></li> <li>Tersedianya portal <a href="http://www.sumbarprov.go.id">http://www.sumbarprov.go.id</a> sebagai media informasi publik</li> <li>Kerjasama yang dilakukan dengan PT Telkom</li> </ul>	<b>Strategi <i>Comparative Advantage</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengeluarkan beberapa produk hukum daerah sebagai landasan hukum pengembangan <i>e-Government</i></li> <li>Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja pengelola program pengembangan <i>e-Government</i></li> </ul>	<b>Strategi <i>Mobilization</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sistem yang kuat</li> </ul>
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara kualitas dan kuantitas SDM belum mencukupi</li> <li>Belum ada unit kerja tersendiri yang mengelola <i>e-Government</i></li> <li>Minimnya anggaran yang tersedia dalam pengembangan <i>e-Government</i></li> <li>Belum semua SKPD terkoneksi dengan jaringan intranet Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>	<b>Strategi <i>Investment/Divestment</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai</li> <li>Menunjuk beberapa orang pegawai untuk mengelola <i>e-Government</i> pada masing-masing SKPD</li> <li>Menyeleksi program-program yang belum mendesak dan optimalisasi anggaran</li> </ul>	<b>Strategi <i>Damage Control</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat</li> </ul>

Sumber: Data diolah Desember 2008

diperoleh bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan analisis terhadap temuan data di lapangan ditemukan beberapa strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan *e-Government*. Strategi ini ditemukan setelah melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT versi Kearns.

dan (4) Strategi *damage control*.

Metode seperti ini sama seperti yang dilakukan oleh Susartono (2006: 2-5) yang melihat bagaimana implementasi *e-Government* di Indonesia. Namun, perbedaannya, Susartono tidak menggunakan analisis SWOT dalam menganalisis implementasi *e-Government* di Indonesia.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-Government adalah dengan: a). Mengeluarkan beberapa produk hukum daerah sebagai landasan hukum pengembangan e-Government. b). Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja pengelola program pengembangan e-Government. c). Menambah jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai. d). Menunjuk beberapa orang pegawai untuk mengelola e-Government pada masing-masing SKPD, e). Menyeleksi program-program yang belum mendesak dan optimalisasi anggaran, f). Membangun sistem yang kuat. g). Berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat

Pola pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-Government) telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuh strategi di atas adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-Government agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dampak yang diharapkan dari pengembangan e-Government tersebut adalah pelayanan publik dengan menggunakan media teknologi informasi (e-Government) semakin memberikan kontribusi yang positif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Ramzy et al. 2006. *Kepedulian Terhadap Lingkungan : Kajian Timbal Balik Antara Lingkungan Kerja dan Nilai Kerja di PT. (PERSERO) Angkasa Pura*, **Jurnal Bisnis & Birokras**. FISIP UI, Vol. XIV. No.1, 388
- Ely Sufianti. 2007. *Aplikasi E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada beberapa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*, **Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung** VOL. IV, No.1, 356
- Gaspersz, Vincent. 2004, *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*, Jakarta, Gramedia.
- Hadi Sutrisno. 2008. *Perencanaan Strategi Penyelenggaraan Yayasan pada STIE, STMIK Insan Pembangunan di Era Otonomi Daerah dan Global*, **Journal of Communications Education**, STIE STMIK Insan Pembangunan Tangerang, Vol.2, No.1, 25-26.
- Junaidi. 2005. "e-Government dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance". **Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada** Volume 9, No. 1, 59-60.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta, Gramedia.
- Salusu, J. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Susartono. 2006. "e-Government di Indonesia", *Spirit Publik*, **Jurnal Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta** Volume 2 No. 1, 2 - 5.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2006. *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo.
- Yudiatmaja, Wayu Eko. 2007. "Mewujudkan Pelayanan Prima dengan Menerapkan e-Government di Sumatera Barat: Dalam Perspektif Otonomi Daerah", **Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta**, Volume 9 No. 1, 36 - 40.
- Yulfian, Hendi, 2007. *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Data dan*

*Informasi Melalui Website <http://sumbarprov.go.id> pada Bagian Telematika Elektronik Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera*

*Barat, Kertas Kerja Perorangan (KKP) pada Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat Diklat Pim III Angkatan XVIII.*